

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup. Kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata diseluruh Tanah Air. Pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional, untuk memperlancar pembangunan nasional maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan Negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah.

Sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-undang yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat memaksimalkan pembangunan untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan, karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur.

Menurut Deddy Supriadi (2011; 109) pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah

terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Deddy Supriadi (2011; 110), sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang Sah.

Penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah memiliki jumlah yang berbeda-beda, tergantung dari potensi masing-masing daerah. Kemana suatu daerah memfokuskan visi dan misi daerahnya. Kota Bekasi yang sesuai dengan visinya sebagai kota jasa, memfokuskan pembangunan segala aspek dibidang jasa. Walaupun tanpa mengesampingkan aspek yang lainnya, selain jasa. Demikian juga dengan penerimaan daerahnya dari sektor pajak,

pemerintah daerah Kota Bekasi menargetkan penerimaan daerah dari pajak daerah terutama dari sektor jasa cenderung lebih tinggi.

Seperti telah dijelaskan dalam latar belakang penelitian ini bahwa pajak daerah yang merupakan sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki beberapa jenis. Dari berbagai jenis pajak daerah kota Kota Bekasi, hampir keseluruhan diperoleh dari sektor jasa. Dan apabila dilihat, jumlah penerimaan dari masing-masing jenis pajak daerah tersebut diatas melebihi anggaran yang ditargetkan.

Kota Bekasi adalah kota yang cukup luas dan awalnya tidak memiliki penduduk yang banyak. Bangunan serta fasilitas di Kota Bekasi awalnya juga tidak banyak jumlahnya. Seiring berjalannya waktu dan disebabkan banyaknya penduduk dari luar Kota Bekasi yang berpindah dan menetap di Kota Bekasi, maka angka pembangunan yang terjadi pun semakin meningkat. Contohnya seperti bertambahnya pembangunan perumahan, apartement, hotel, sekolah, rumah sakit, dan restaurant.

Lahirnya media baik cetak dan elektronik, dijadikan sebagai modal besar untuk para pengguna sektor perdagangan, salah satu yang paling diminati adalah pemasaran lewat media reklame. Media reklame dianggap sebagai alternatif pemasaran yang menguntungkan dan sangat efektif, reklame dianggap mampu menarik calon konsumen karena reklame bisa diakses oleh semua pihak. Hal ini menjadikan reklame sebagai salah satu yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik dalam hal pemberian aturan dan tarif pemasangan reklame yang diatur oleh undang-undang maupun peraturan daerah. Pajak Reklame dan Retribusi dapat memberikan kontribusi tersendiri terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), hal ini terlihat pada penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 Realisasi Pajak Reklame dan Retribusi Daerah

| Tahun | Pajak Reklame | Retribusi Daerah |
|--------------|----------------------|-------------------------|
| 2008 | 10.957.995.950 | 2.622.286.292 |
| 2009 | 13.261.397.470 | 2.877.880.800 |
| 2010 | 13.875.969.916 | 3.775.396.045 |
| 2011 | 16.317.201.997 | 6.051.487.394 |
| 2012 | 16.187.872.619 | 6.108.187.680 |

Sumber data: Dispenda Kota Bekasi

Pemerintah diharap dapat mengoptimalkan objek pajak ini guna menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan dan membiayai pembangunan.

Penelitian yang berkaitan dengan Pajak Reklame telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya Widyaningsih (2009), Triantoro (2010), dan Herry Pujiastuti (2014). Hasil penelitian Widyaningsih (2009) mengenai Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode 2001-2007 menyimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak reklame dari tahun 2001 hingga tahun 2002 berada di bawah target dan realisasi penerimaan pajak reklame, sedangkan potensi penerimaan pajak reklame tahun 2003 hingga tahun 2007 lebih tinggi dari target dan realisasi penerimaan pajak reklame. Penelitian Triantoro (2010) mengenai Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas pemungutan pajak reklame di Kota Bandung 2006 cukup baik, mencapai 35,56%, laju pertumbuhan Pajak Iklan selama enam tahun terakhir menunjukkan rata-rata mencapai 53,94% per tahun. Potensi pajak reklame yang harus diperoleh oleh Kota Bandung dapat mencapai Rp. 48.736.510, pajak reklame tahun 2000 dan kontribusi terhadap Pajak Daerah untuk tahun 2006 berdasarkan realisasi mencapai 15,84%, sedangkan berdasarkan potensinya mampu mencapai 29,77%.

Dilain pihak penelitian Herry Pujiastuti (2014) mengenai Pengaruh Kontribusi Penerimaan pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap

Universitas Bhayangkara Jaya

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Kota Bekasi menyimpulkan bahwa Kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bekasi sangat potensial. Hasil analisis menunjukkan bahwa koefisien dari pajak reklame adalah 0.471426 dan koefisien pajak penerangan jalan adalah 0.382029 yang menunjukkan pajak reklame dan pajak penerangan jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai Adjusted R-squared (R^2) adalah sebesar 0.635715 yang artinya bahwa 63,57% pajak reklame dan pajak penerangan jalan mempengaruhi pendapatan asli daerah, sisanya 36,43% dipengaruhi pendapatan daerah lain.

Fenomena pajak reklame yang ada di Kota Bekasi dan penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka peneliti tertarik untuk mengembangkan dan menerapkan beberapa unsur penelitian tersebut di Kota Bekasi sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame dan retribusi. Sebenarnya potensi yang dimiliki pajak reklame dan retribusi dapat digali melalui intensifikasi pajak reklame dan retribusi dengan langkah pendataan serta memiliki pengetahuan mengenai objek pajak reklame dan retribusi itu sendiri. Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari penentuan target pendapatan yang tidak sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga nantinya tidak akan berimbas terhadap realisasi penerimaan pajak reklame dan retribusi. Setelah langkah tersebut dilakukan dapat pula diketahui efektifitas pemungutan pajak reklame guna meningkatkan penerimaan pajak sehingga pajak reklame dan retribusi memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan pendapatan asli daerah secara umum.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak reklame, salah satu pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan andil yang besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah. Maka dalam penelitian ini mengambil judul: **“Pengaruh Pajak Reklame Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bekasi”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan pajak reklame dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pajak reklame terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
2. Mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?
3. Mengetahui secara simultan pengaruh pajak reklame dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Reklame dan Retribusi Daerah.

2. Bagi Masyarakat

Digunakan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran bagi yang mengadakan penelitian berikutnya, terutama yang berhubungan dengan Pajak Reklame dan Retribusi daerah.

1.5 Batasan Penelitian

Mengingat luasnya penelitian ini, maka penelitian pajak reklame dan retribusi ini dibatasi hanya pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bekasi yang berada di Bekasi dan yang bersedia menjadi objek penelitian pada tahun 2010 sampai tahun 2013.

1.6 Model Operasional Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh pajak reklame dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Bekasi. Pengaruh pajak reklame sebagai variabel Independen (X_1), retribusi daerah sebagai variabel Independen (X_2), penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Dependen (Y). Dengan indikator data jumlah penerimaan pajak reklame dan retribusi daerah kota Bekasi selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.

Dari seluruh uraian skripsi ini, penulis membagi uraiannya kedalam V bab sebagai berikut:

Bab kesatu Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penulis sehingga kemudian merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalaminya, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan model operasional penelitian.

Bab kedua tinjauan pustaka dalam bab ini akan diuraikan mengenai definisi teori tentang pajak reklame, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, penelitian terdahulu, kerangka teoritikal dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga metodologi penelitian dalam bab ini akan diuraikan mengenai tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat analisis dan pembahasan dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab kelima kesimpulan dan saran dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

